

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

KINERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOTA MANADO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

*Herryanto Sabaru*¹
*Daud Liando*²
*Neni Kumayas*³

Abstrak

Persoalan kependudukan menjadi semakin pelik dalam dunia yang bertumbuh pesat jumlah jiwanya, karena itu konsep keluarga berencana selalu menjadi solusi. Kaitan dengan itu penelitian ini melihat sejauh mana pengaruh komponen-komponen tersebut dalam menentukan kinerja BKKBN Kota Manado dalam menekan angka laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado. Berdasarkan indikator pengukuran kinerja menurut Agus Dharma, pada BKKBN Kota Manado dengan metode penelitian kualitatif mendapati bahwa secara umum kinerja dari BKKBN Kota Manado sudah efektif, terlihat dari tenaga kerja yang cukup memadai serta prestasi kerja yang diukur dari terlaksananya program-program tahunan walaupun tahun 2016 lebih besar nilai pengguna KB daripada tahun 2017 namun secara keseluruhan program kerja terlaksana dengan baik. Serta dalam kemampuan pegawai dalam memanfaatkan peralatan kantor dimana terdapat sarana prasarana yang disediakan Dinas BKKBN Manado cukup memadai.

Kata Kunci : Kinerja, BKKBN, Keluarga Berencana.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Masalah kependudukan tidak dapat dipungkiri sangat lekat dengan Negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk tinggi seperti Indonesia. Sementara di dunia internasional, masalah ledakan penduduk dalam sejarah banyak diungkapkan oleh Thomas Robert Malthus. Menurut Malthus, penduduk terus mengalami perkembangan jumlahnya seiring dengan terus terjadinya kelahiran. Kondisi tersebut dinilai menjadi masalah karena setiap manusia memerlukan makanan, dan dalam hal ini laju pertumbuhan makanan dianggap tidak sebanding dengan kecepatan laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, apabila tidak dilakukan upaya pembatasan terhadap angka kelahiran, maka akan terjadi bencana kekuarangan bahan makanan. Pada akhirnya, timbul berbagai masalah lain seperti kemiskinan dan masalah sosial lainnya (Mantra, 2004:51).

Pada perkembangannya, isu tersebut terus mendapat perhatian dunia internasional. Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1996 yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1996 telah mengubah paradigma Program Keluarga Berencana (Program KB), dari yang sebelumnya melalui pendekatan target demografi melalui pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan akses dan kualitas dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender yang meletakkan penduduk sebagai "Pusat Pembangunan" (BKKBN, 2001: 5).

Terkait dengan hal tersebut, Program KB dalam hal ini diartikan sebagai suatu program yang dimaksudkan untuk membantu para pasangan dan perorangan dalam mencapai reproduksi, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan mengurangi insiden

kehamilan beresiko tinggi, kesakitan dan kematian, membuat pelayanan yang bermutu, terjangkau, diterima dan mudah diperoleh bagi semua orang yang membutuhkan, meningkatkan mutu, nasehat, komunikasi, informasi, dan edukasi, konseling dan pelayanan, meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab pria dalam praktek KB, dan meningkatkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk penjarangan kehamilan (BKKBN, 2001: 5). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa Program KB memiliki tujuan yang sangat kompleks. Apabila dapat dicapai, maka manfaat positifnya tidak hanya secara sempit dicapai oleh peserta KB, tetapi juga secara luas untuk pembangunan Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan badan pemerintah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Program KB. BKKBN adalah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Tugas dari BKKBN yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kinerja

Kata "Kinerja" telah menjadi kata yang telah memasyarakat, seringkali istilah kinerja ini, mulai dari media massa, pejabat birokrasi, pelaku bisnis bahkan sampai masyarakat awam, namun demikian tidak ditemukan definisi yang definitif tentang kinerja. Hal ini dikarenakan istilah kinerja tidak ditemui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecuali kamus bahasa Indonesia lainnya yang menyatakan bahwa kinerja merupakan sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atas kemampuan kerja. Dalam Kamus

Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. Sehingga berbagai pihak cenderung memberikan padanan kata kinerja dengan ‘*performance*’ dalam bahasa Inggris.

Adapun pengertian kinerja, yang dikemukakan oleh Agus Dharma (1991:46) yaitu sebagai berikut: “Kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai oleh pegawai, prestasi kerja yang diperhatikan oleh pegawai, kemampuan kerja berkaitan dengan penggunaan peralatan kantor”. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (1999:3), merumuskan kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan bahwa Kinerja Karyawan (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengertian kinerja menurut Sedarmayanti (2007) menyatakan bahwa: “Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya)”.

Sedangkan Hasibuan (2003:94) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Kinerja adalah merupakan gabungan dari tiga faktor

penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor diatas, maka akan semakin besar pula kinerja dari pegawai yang bersangkutan.

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi itu memenuhi harapan dan panggilan jasa, Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Agus Dwiyanto (2007:56)

Konsep Program Keluarga Berencana

Menurut WHO (World Health Organisation) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk: (1) mengindari kelahiran yang tidak diinginkan, (2) mendapatkan kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval diantara kelahiran, (4) mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, (5) menentukan jumlah anak dalam keluarga (Hartanto, 2004). Keluarga Berencana adalah sebagai proses penetapan jumlah dan jarak anak yang diinginkan dalam keluarga seseorang dan pemilihan cara yang tepat untuk mencapai keinginan tersebut (Mc Kenzie, 2006).

Tujuan Keluarga Berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Sedangkan dalam era

otonomi daerah saat ini pelaksanaan program Keluarga Berencana nasional bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas memiliki visi, sejahtera, maju, bertanggung jawab, bertakwa dan mempunyai anak ideal, dengan demikian diharapkan :

- a. Terkendalinya tingkat kelahiran dan penambahan penduduk.
- b. Meningkatnya Jumlah peserta KB atas dasar kesadaran, sukarela dengan dasar pertimbangan moral dan agama.
- c. Berkembangnya usaha-usaha yang membantu peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, serta kematian ibu pada masa kehamilan dan persalinan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud memahami fenomena tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). Oleh sebab itu, penelitian ini tidak dilakukan untuk menguji hipotesis tertentu, tetap mengai fakta secara mendalam. Pada penelitian ini, hal utama yang dikaji adalah mengenai Kinerja BKKBN dalam pelaksanaan Program KB di Kota Manado, beserta dengan kendala-kendala yang menjadi penghambat dari peranan tersebut, pengumpulan datanya melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen.

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Manado. Terutama yaitu di kantor BKKBN wilayah tersebut. Sementara penelitian direncanakan akan dilakukan pada bulan Mei 2018. Dalam jangka waktu tersebut, akan dilakukan rangkaian proses penulisan rancangan

penelitian, penelitian lapangan, serta penulisan laporan penelitian.

Fokus dari penelitian ini yaitu Kinerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah Kota Manado sebagai suatu instansi pemerintah. Sementara objek penelitian yang dikaji adalah Kinerja BKKBN dalam pelaksanaan Program KB di Kota Manado dengan menggunakan teori Agus Dharma yaitu :“Kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai oleh pegawai, prestasi kerja yang diperhatikan oleh pegawai, kemampuan kerja berkaitan dengan penggunaan peralatan kantor”.

Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan mengacu pada Teori Agus Dharma (1991:46) menyatakan bahwa “Kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai oleh pegawai, prestasi kerja yang diperhatikan oleh pegawai, kemampuan kerja berkaitan dengan penggunaan peralatan kantor”.

Tenaga Kesehatan

Sumber daya manusia sangat penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Sumber daya manusia diperlukan untuk menunjang terlaksananya suatu program. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu program. Manusia merupakan aset utama organisasi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Tenaga kesehatan yang kurang terampil menjadi salah satu penyebab pekerjaan tidak terselesaikan secara optimal (Sudarmayanti dalam Husni dkk, 2012:78).

Tenaga yang terlibat dalam program KB di Kota Manado yaitu 10 petugas sebagai Koordinator Wilayah KB ada di 10 Kecamatan dan 6 PLKB dan 1 PKB Kota Manado. Berdasarkan penelitian dari petugas kesehatan menyatakan

bahwa butuh penambahan petugas PKB yang baru. Jumlah tenaga PKB hanya 1 orang bertugas di 9 Kelurahan di Kota Manado. Berdasarkan penelitian bahwa idealnya seorang tenaga PKB melayani 2 Kelurahan. Tenaga Kesehatan yang kurang yaitu PKB. PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang langsung berhubungan dengan masyarakat di desa/kelurahan binaannya. PKB adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB.

Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu diupayakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB dalam penyuluhan KB dan KS

(PLKB dan PKB sebagai PNS atau non PNS) yang diangkat oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 2 (dua) Kelurahan minimal tersedia seorang (satu) PLKB/PKB.

Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan salah satu poin penting dalam mengukur sebuah kinerja. Diman prestasi kerja merupakan proses melalui mana organisasi mengevaluasi dan menilai prestasi kerja. Prestasi kerja pada BKKBN provinsi Kota Manado diukur dari pencapaian program yang terencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan program-program dari BKKBN Kota Manado sudah terealisasi dengan baik dimana semua program dilaksanakan dengan terus berkoordinasi antara pegawai yang ada di Kantor Dinas BKKBN dengan masing-masing Koordinator Wilayah. Dan juga setiap program yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Dari kutipan wawancara dapat dikatakan prestasi

kerja BKKBN Provinsi Kota Manado sudah baik.

Prestasi kerja BKKBN Kota Manado baiknya bukan hanya berfokus pada prestasi secara program tapi bagaimana mengembangkan program agar supaya tiap tahun pelaksanaan program mengalami kenaikan secara signifikan. Terlihat dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pengguna alat kontrasepsi Suntikan menjadi favorit pengguna KB dengan total sebesar 21.521 suntikan. Hal ini menjadi acuan untuk Penyuluh Keluarga Berencana untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan alat kontrasepsi lain seperti IUD, Kondom, dll.

Sedangkan untuk perbandingan jumlah pengguna tahun 2016 dan 2017 yang digambarkan pada tabel 4.3 menunjukkan penurunan pengguna dimana tahun 2016 total pengguna sebesar 24.185 sedangkan pengguna 2017 sebesar 5.252. hal ini menunjukkan kemerosotan pengguna dalam selang waktu 1 tahun. Walaupun kecenderungan penurunan pasti terjadi karena pengguna Kontrasepsi IUD jika telah dilakukan tahun 2016 maka di tahun 2017 tidak akan menggunakan lagi karena masa kontrasepsi IUD mencapai 5 tahun. Tapi hal ini hanya akan berdampak kecil pada pengguna Kontrasepsi lainnya. Sebaiknya BKKBN Kota Manado dapat melakukan pengembangan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB.

Kemampuan Kerja Berkaitan dengan Penggunaan Peralatan Kantor

Peningkatan kualitas kinerja pengelola program KB nasional harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan terstandarisasi secara nasional mulai tingkat pusat sampai provinsi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Program Keluarga Berencana yang

ada di puskesmas ataupun di kelurahan harus memiliki sarana, prasarana dan peralatan. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang dalam melaksanakan suatu kegiatan. Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan suatu program dan dapat menunjang kelancaran suatu program. Sarana dan prasarana pelayanan KB meliputi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan statis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terdapat sarana dan prasarana yang ada di coordinator wilayah kecamatan dan sarana prasarana tersebut dititip di UPTD. Data-data ini dapat diperoleh dari pelaporan pelayanan tiap bulan dan laporan pengendalian program KB ataupun hasil dari pemantauan ke lapangan.

Sarana dan prasarana yang ada di tingkat kota sampai kecamatan sudah memadai seperti tersedianya seperti tersedianya kendaraan roda dua dan roda empat serta computer untuk memfasilitasi coordinator menjangkau wilayah kerja. Dan tidak ada hambatan dalam penggunaannya karena rata-rata pegawai dapat mengoperasikan sarana prasarana yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai didukung dengan adanya sarana prasarana juga disertai dengan keahlian pegawai dalam memanfaatkan sarana prasarana ini menunjang kemampuan pegawai dalam melaksanakan kegiatan BKKBN Kota Manado.

Proses (Process)

Manajemen menurut George Terry yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.

Perencanaan merupakan proses merumuskan tujuan organisasi sampai penetapan alternatif kegiatan untuk mencapainya. Pengorganisasian bertujuan untuk menghimpun sumberdaya yang ada dan dimanfaatkan secara efisien untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian meliputi proses pelaksanaan. Pengawasan untuk mengamati kegiatan sesuai perencanaan yang sudah disusun.

Pembahasan manajemen pelaksanaan program kb dalam tulisan ini memakai teori George Terry yaitu POAC atau Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), dan Controlling (Pengawasan).

Langkah pertama perencanaan dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perencanaan dalam kegiatan Program KB. Sasaran pelayanan KB ditentukan berdasarkan hasil pendataan. Hasil penelitian yang dilakukan kepada informan yang berkaitan dengan program KB di Kecamatan ini menunjukkan bahwa perencanaan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang jelas dari tingkat kota sampai tingkat kecamatan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, mengolompokkan, dan atur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan fungsi oleh pimpinan kepada staf untuk mencapai tujuan. Empat pilar dalam pengorganisasian yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert yaitu pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, hirarki dan koordinasi. Pembagian kerja merupakan upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat sederhana dan spesifik. Setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian

pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Hirarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Hasil penelitian dari informan menunjukkan pengorganisasian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah jelas hingga ke tingkat kecamatan. Disini Puskesmas hanya menjadi Mitra Kerja, bukan bagian pengorganisasian.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah semua aktifitas kerja yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan program KB di Kota Manado hanya melaksanakan pelayanan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun pelaksanaan program diluar jadwal dimungkinkan dilaksanakan jika ada permintaan dari instansi lain.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB terlaksana dengan baik. Tidak ada Hambatan yang berat untuk pelaksanaan program sehingga pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengamati dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Setelah pengawasan terdapat penilaian seperti hasil kerja dengan sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk menunjang penyajian data dan informasi program KKB nasional secara cepat, tepat, dan akurat maka dilakukan suatu cara dalam pengumpulan data melalui suatu sistem pencatatan dan pelaporan program KKB nasional yang salah satunya adalah sistem pencatatan

dan pelaporan pelayanan kontrasepsi. (BKKBN 2013)

Berdasarkan hasil penelitian pengawasan program KB di Kota Manado sudah cukup baik dan berjenjang. Adanya pengawasan dari Dinas Pengendalian Penduduk, pencatatan dan pelaporan bulanan. Laporan bulanan pengendalian lapangan tingkat Kecamatan dibuat oleh Pengendali PLKB/Pengelola program kependudukan dan KB kecamatan sesuai dengan data dalam formulir Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Kecamatan dan data Potensi Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang diterima dari seluruh Desa/kelurahan yang ada di wilayahnya dan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Program Kependudukan dan KB (SKPD-KB) Kabupaten/Kota setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya.

Penutup

Berdasarkan indikator pengukuran kinerja menurut Agus Dharma, pada BKKBN Kota Manado dapat dikatakan bahwa secara umum kinerja dari BKKBN Kota Manado Sudah efektif, terlihat dari tenaga kerja yang cukup memadai serta prestasi kerja yang diukur dari terlaksananya program-program tahunan walaupun tahun 2016 lebih besar nilai pengguna KB daripada tahun 2017 namun secara keseluruhan program kerja terlaksana dengan baik. Serta dalam kemampuan pegawai dalam memanfaatkan peralatan kantor dimana terdapat saran prasarana yang disediakan Dinas BKKBN Manado cukup memadai.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis kemudian memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi masukan untuk lebih meningkatkan kinerja BKKBN Kota Manado, antara lain: Sebaiknya pihak BKKBN

merekrut tenaga penyuluh yang berasal dari tiap kecamatan yang ada di Kota Manado agar bisa bekerja secara maksimal dan tidak terkendala jarak dan waktu lagi. Sebaiknya BKKBN Kota Manado melakukan sosialisasi untuk alat kontrasepsi yang masih kurang diminati masyarakat agar masyarakat tahu program-program yang ada di BKKBN sehingga bisa berpartisipasi pada program tersebut. Memberikan teguran atau sanksi kepada penyuluh yang kurang maksimal menjalankan kinerjanya. Sebaiknya BKKBN lebih intens dalam melakukan sosialisasi program-program yang di tawarkan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih paham dan berpartisipasi pada setiap kegiatan yang di lakukan oleh BKKBN di seluruh kecamatan yang ada di Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BKKBN.2001. *Peran Pria melalui Program KB dalam Kesehatan Maternal. Gema Partisipasi Pria*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2008. *Rapat Kerja Program KB Nasional Jawa Tengah Tahun 2008: Kebijakan dan Strategi Operasional Pencapaian Sasaran Tahun 2008- 2009*. Jawa Tengah. Jakarta: BKKBN.
- Dharma, Agus. 1991. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, Agus. 2007. *Definisi kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Direktorat Partisipasi Pria-Puslitbang KB-KR BKKBN.2001.*Studi IdentifikasiPartisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi diPropinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Jakarta: BKKBN.
- Fahmi, Irham. 2007. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.Hasibuan, Malayu S.P. 2003.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Kesehatan. 2013. *Rencana Aksi Nasional Pelayanan Keluarga Berencana 2014-2015*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kenzie. Mc. 2006. *Definisi Keluarga Berencana*. Jakarta.
- Mantra, I. Bagus.2004.*Demografi Umum*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu.2005.*Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*.Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Parsons, W. 2008.*Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. (Penerjemah: Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sedarmayanti.2007.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Bandung: Refika Aditama.
- Stephen Robbins. 1989. *Kinerja dan hasil evaluasi terhadap pekerjaan*. Yogyakarta
- Sensus Penduduk Indonesia. 2010.